KR-Sukro Riyadi

***KOMODITAS BAWANG MERAH:** Petani di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, menyiram tanaman bawang merah, Rabu (14/7). Wilayah tersebut menjadi pusat produksi bawang merah terbesar di Kabupaten Bantul dan sekitarnya. Selain memenuhi kebutuhan warga lokal, komoditas itu juga menopang kebutuhan secara nasional.*

DPR SAHKAN UU OTSUS PAPUA

Bentuk Keberpihakan kepada Orang Asli Papua

JAKARTA (KR) - Rancangan UU Otonomi Khusus Papua yang disetujui menjadi UU oleh DPR RI, Kamis (15/7), merupakan bentuk keberpihakan pemerintah, DPR dan DPD terhadap Orang Asli Papua (OAP). Keberpihakan itu terwujud dalam perubahan pada 20 Pasal UU No 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan upaya melindungi dan menjunjung harkat OAP.

Demikain disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. "Dalam pembahasan, kami berpihak kepada prinsip dan semangat melindungi dan menjunjung tinggi harkat Orang Asli Papua dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Tito mewakili Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Otsus Papua.

Mendagri menerangkan, ada tiga bentuk keberpihakan yang termuat dalam UU Otsus Papua, yaitu afirmasi bidang politik, afirmasi bidang ekonomi dan afirmasi tata kelola pemerintahan. Ada dua langkah afirmasi bidang politik, Orang Asli Papua mendapatkan jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) sebanyak seperempat dari total kursi yang tersedia. "Perwakilan rakyat dari kelompok OAP itu akan dipilih lewat mekanisme pengangkatan," kata Tito.

Sementara itu, afirmasi lainnya diberikan kepada perempuan asli Papua yang mendapatkan jatah 30 persen kursi DPRK di Papua sebagaimana diatur dalam Rancangan UU Otsus yang baru. "Ini menunjukkan semangat tinggi dari kita mendorong persamaan gender di Papua," ujar Tito kepada para peserta Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 yang dihadiri 492 Anggota Dewan secara langsung dan virtual.

Kemudian, afirmasi bidang ekonomi, menurut Tito, tercermin dalam peningkatan alokasi Dana Otsus dari dua persen menjadi 2,25 persen. Sementara itu, dana bagi hasil minyak dan gas ditetapkan sebanyak 70 persen. **(Ant)-d**

PEMBANGUNAN JALUR KA YIA CAPAI 96,32 PERSEN

17 Agustus Operasional Terbatas

KULONPROGO (KR) - Progres pembangunan jalur kereta api (KA) menuju Bandara Internasional Yogyakarta/Yogyakarta International Airport (YIA) sudah mencapai 96 persen. Ditargetkan 17 Agustus 2021 mendatang jalur KA YIA ini sudah dapat dioperasionalkan secara terbatas.

"Saat ini progresnya sudah masuk tahap akhir mencapai 96,32 persen, yaitu pemadatan *balast* menggunakan *multi tie temper* atau MTT, selanjutnya dilakukan uji coba rel. MTT berfungsi memadatkan batu-batu atau *ballast* di bawah rel kereta api agar rel lebih tahan lama," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Area 1 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dheky Martin kemarin.

Dheky Martin menjelaskan, untuk uji coba nanti menggunakan lokomotif tanpa gerbong. Kalau sukses akan dilanjutkan uji coba lokomotif dengan rangkaian gerbong. Pihaknya menargetkan serangkaian uji coba selesai sebulan, selanjutnya jalur kereta api bisa dioperasikan secara terbatas mulai 17 Agustus 2021.

"Target kami tetap 17 Agustus mulai operasional, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana," ujarnya.

Diungkapkan, dalam pengerjaan salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional tersebut secara umum sudah sesuai rencana, tapi memang ada sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya keterbatasan oksigen untuk pengelasan rel. "Kami kekurangan oksigen untuk pengelasan rel karena fokus digunakan untuk kepentingan medis, padahal masih ada 45 yang belum dilas, segera akan kami koordinasikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tutur Dheky.

Dari panjang total jalur rel KA 5,4 kilometer, sekarang tinggal tersisa 500 meter yang belum terpasang rel. Khusus stasiun di kawasan YIA, saat ini sudah masuk tahap pemasangan *overkapping*. "Untuk stasiun bandara sudah dikerjakan PT Angkasa Pura I. Mereka sudah membuat konstruksi *overkapping*-nya," ucapnya.

Pimpinan Proyek Pembangunan YIA Taochid Purnama Hadi mengungkapkan, pembangunan *overkapping* menelan anggaran hingga Rp 28 miliar dengan lebar 20 meter dan panjang 300 meter. Nanti *overkapping* akan tersambung dengan Stasiun Bandara YIA. Stasiun bandara ini memiliki luas 1.500 meter persegi dan mampu menampung hingga 200 orang.

"Struktur *overkapping* di kawasan YIA akan menggunakan baja dan atap memakai material metal. Sedangkan *fasad* bangunan memanfaatkan aluminium dan kaca," ujarnya.

Ditambahkan, dalam upaya mengejar target operasional Agustus mendatang, proses pengerjaan akan dilakukan selama 24 jam dengan sistem *shift*. **(Rul)-d**

BBPPKS Regional III Yogya untuk Dapur Umum

JAKARTA (KR) - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginstruksikan kepada jajarannya agar Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta di Sonosewu, disiapkan menjadi lokasi perluasan layanan dapur umum Kemensos. Langkah itu dilakukan untuk menyiapkan kemungkinan perluasan dukungan permakanan bagi masyarakat melalui dapur umum.

Kemensos sendiri telah mengaktifasi tujuh dapur umum yang sebagian berbasis di Unit Pelayanan Teknis (UPT). Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan bantuan permakanan dari berbagai daerah. Menurut Mensos, lembaga yang dipimpinnya telah mendirikan dapur umum di Halaman Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, di halaman Convention Hall Surabaya, Balai Besar Prof Dr Soeharso Solo, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Ciung Wanara Bogor, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Balai Mahatmiya Tabanan Bali dan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyatakan, awalnya di kantor Kemensos di Jalan Salemba melayani penyaluran telur matang ke masyarakat kurang mampu. **(Ati)-d**

OPTIMISME KAPOLRI SAAT TINJAU VAKSINASI

'Herd Immunity' Terbentuk di Agustus-September

JAKARTA (KR) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan kolaborasi vaksinasi massal antara Polri dengan PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di SMA Negeri 38 dan PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) di Universitas Indraprasta, Jakarta, Kamis (15/7).

Sigit mengungkapkan, dengan adanya peran pemuda menjadi garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19, maka optimisme terbentuknya Herd Immunity terhadap virus Korona bisa terwujud di sekitar bulan Agustus hingga September.

"Sehingga target kita akhir tahun paling tidak atau menjelang bulan Agustus, September, *herd immunity* (kekebalan komunal-*red*) segera bisa terwujud," kata Sigit dalam tinjauannya tersebut, seperti disampaikan dalam siaran pers yang diterima redaksi *KR*, Kamis (15/7).

KR-Istimewa

Kapolri (dua dari kiri) bersama tim pendukung program vaksinasi.

Seiring dengan tercapainya target Pemerintah mewujudkan kekebalan kelompok, mantan Kapolda Banten ini menekankan bahwa, roda perekonomian masyarakat yang sempat terhambat akibat pandemi bakal bisa segera bangkit atau pulih.

"Kemudian masyarakat diharapkan bisa kembali laksanakan aktivitasnya sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik," ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Optimisme Herd Immunity akan segera terwujud, menurut Sigit, juga terlihat dari antusiasme yang tinggi dari para peserta vaksinasi kategori anak usia 12 tahun ke atas.

"Hari ini dilaksanakan kegiatan vaksinasi untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas dari mulai SMP, SMU, dan juga anak-anak SD yang sudah bisa divaksin. Tentunya kami melihat anak-anak pun antusias untuk divaksin ini merupakan kabar baik untuk kita semua," ucap mantan Kadiv Propam Polri itu.

Sigit berharap, kolaborasi vaksinasi massal ini bisa berlanjut ke seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat, sinergitas, kerja sama dan saling bergandengan tangan antarkelompok menjadi kunci dalam penanganan Pandemi Covid-19. **(Jon)-d**

TERDAMPAK PPKM DARURAT

Bantuan Ekonomi Dipercepat

JAKARTA (KR) - Sejalan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, 3-20 Juli 2021, Pemerintah memastikan kondisi keuangan Indonesia terkendali meski menghadapi lonjakan Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat. Dukungan APBN untuk PPKM Darurat dan penanganan kesehatan dilakukan melalui realokasi APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Karena aktivitas dan mobilitas jadi terbatas pada masa PPKM Darurat, masyarakat dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) membutuhkan bantuan untuk menopang perekonomian mereka. Kita mendorong percepatan penyerapan PEN dan memunculkan kembali beberapa program bantuan sosial (bansos)," terang Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pada Dialog KPC-PEN, Kamis (15/7).

Disebutkan, total dukungan APBN Rp 699,43 triliun untuk Program PEN kembali ditata ulang. Rinciannya yakni menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp 148,27 triliun menjadi Rp 153,86 triliun, anggaran kesehatan naik dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 193,93 triliun, realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp 193,74 triliun menjadi Rp 171,77 triliun, menaikkan insentif usaha dari Rp 56,73 triliun menjadi Rp 62,83 triliun, serta realokasi program prioritas dari Rp 127,85 triliun menjadi Rp 117,04 triliun.

Susiwijono menyampaikan, klaster perlindungan sosial pada Program PEN ada yang dipercepat pencairannya, diperpanjang periodenya, dan ditambahkan jumlahnya. Pemerintah pun akan memperpanjang Program Bantuan Sosial Tunai, mendorong percepatan penyerapan bantuan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Sembako. Strategi ini untuk membantu daya tahan ekonomi masyarakat. "Bagaimana pun konsumsi masyarakat berkontribusi hampir 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita," terangnya.

Selain masyarakat perkotaan, masyarakat desa juga terpukul oleh pandemi Covid-19 ini, terutama desa berbasis ekonomi pariwisata, pertanian, dan perikanan. Masyarakat di desa juga terdampak penurunan pendapatan. **(San)-d**

BANTUAN AS UNTUK INDONESIA

1,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Tiba

JAKARTA (KR) - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim mengumumkan kedatangan 1.500.100 dosis vaksin Covid-19 Moderna pemberian Pemerintah AS melalui COVAX, Kamis (15/7). Pengiriman ini merupakan tambahan dari 3 juta dosis yang tiba pada Minggu (11/7), sehingga total donasi vaksin AS untuk Indonesia menjadi 4,5 juta dosis.

"Kami berupaya untuk memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif, sehingga sebanyak mungkin orang Indonesia dapat divaksinasi secepat mungkin," kata Dubes Kim dalam siaran pers yang diterima , Kamis (15/7).

AS telah berkomitmen untuk kontribusi senilai 4 miliar dolar dari rakyat Amerika melalui Gavi, the Vaccine Alliance untuk COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC). Kontribusi AS mendukung pembelian dan pengiriman vaksin Covid-19 untuk 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Dengan pengiriman terbaru ini maka Indonesia telah menerima lebih dari 12,7 juta dosis melalui COVAX AMC, sebuah inisiatif global untuk mendukung akses adil ke vaksin-vaksin Covid-19 yang aman dan efektif.

Selain itu, Presiden AS Joe Biden juga telah berkomitmen untuk menyediakan 80 juta vaksin Covid-19 yang aman dan efektif untuk negara-negara yang memerlukan di seluruh dunia untuk membantu mengakhiri pandemi ini.

Indonesia akan menerima sebagian dari vaksin tersebut. Rencana Presiden Biden terkait 80 juta dosis yang akan didonasikan ini mencakup lebih dari 23 juta dosis untuk Asia, sebagai upaya untuk menjaga agar kawasan, dan Indonesia, aman.

AS juga memberikan bantuan untuk upaya respons Covid-19 Indonesia yang lebih luas. Hingga saat ini, AS telah menginvestasikan 36 juta dolar untuk mendukung upaya Indonesia meningkatkan pelayanan vaksinasi, mempercepat tes dan pelacakan kasus, berbagi informasi faktual, serta meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas kesehatan. "Kontribusi AS mencakup lebih dari 1.000 ventilator yang saat ini digunakan di 600 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia," ujar Dubes Kim. **(Bro)-d**

KEMENHUB SIAPKAN PENANGANAN DI MAKASSAR

Kapal Pelni untuk Isolasi Apung

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Kapal Pelni sebagai tempat isolasi mandiri para pasien penderita Covid-19 yang bergejala ringan. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu Pemkot Makassar menyusul tingginya angka kasus positif Covid-19 dan terbatasnya ruang perawatan di Makassar.

KR-Istimewa

Kapal milik Pelni yang akan digunakan untuk tempat isolasi apung.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo mengatakan, penyediaan kapal ini merupakan tindaklanjut dari usulan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. "Kemenhub telah memberikan izin dan telah berkoordinasi kepada Pelni terkait dengan penyediaan kapal. Selanjutnya, terkait operasional isolasi dan penyediaan nakes akan dikoordinasikan oleh Pemda setempat," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/7).

Agus mengungkapkan, PT Pelni menyiapkan kapal penumpang KM Umsini untuk isolasi apung yang telah tiba Rabu (14/7) di Makassar. KM Umsini yang saat ini tengah berhenti beroperasi sementara waktu (port stay) karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 1.995 unit.

"Untuk pelaksanaan isolasi mandiri ini, digunakan maksimal 50 persen dari kapasitas total yaitu sebanyak 868 unit dengan 68 unit di antaranya untuk nakes," jelas Agus.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Capt Antoni Arif Priyadi menyebutkan, penyediaan kapal untuk isolasi apung ini masih dalam tahap persiapan. Adapun beberapa aspek yang tengah disiapkan untuk isolasi apung, salah satunya penetapan status kapal sebagai tempat isolasi mandiri oleh Ditjen P2P Kementerian Kesehatan. **(Imd)-d**